

GAMBARAN INDONESIA TANPA KORUPSI

Korupsi Sebagian Penghalang Indonesia Menjadi Negara Maju

Izdihar Hafizhah

isdiharhafizhah@gmail.com

Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, dengan populasi yang besar dan lokasi geografis yang strategis. Secara teori, faktor-faktor ini seharusnya memungkinkan Indonesia menjadi negara yang berkembang pesat. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial-ekonomi, dan rendahnya kualitas layanan publik. Salah satu hambatan utama yang secara konsisten menghalangi terwujudnya potensi nasional ini adalah fenomena korupsi.

Korupsi bukan sekadar masalah hukum atau etika melainkan, korupsi telah merusak berbagai dimensi kehidupan sosial. Dampaknya meliputi penyalahgunaan anggaran pembangunan, pelaksanaan proyek infrastruktur yang sembarangan, serta akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama pembangunan justru menjadi korban dari sistem yang korup.

Membahas isu ini sangat penting mengingat Indonesia saat ini berada dalam fase transisi kritis menuju pencapaian visinya menjadi negara maju pada tahun 2045. Tanpa kebijakan konkret dan terstruktur untuk memberantas korupsi, aspirasi-aspirasi ini akan tetap menjadi wacana retorik belaka tanpa implementasi yang nyata. Oleh karena itu, pemahaman kolektif bahwa pemberantasan korupsi bukanlah pilihan opsional melainkan prasyarat esensial bagi kemajuan bangsa telah menjadi tuntutan mendesak.

Untuk benar-benar memahami betapa seriusnya masalah ini, diperlukan analisis mendalam terhadap data dan fakta empiris yang tersedia. Menurut Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan setiap tahun oleh Transparency International, Indonesia secara konsisten memperoleh skor yang jauh di bawah standar yang diharapkan. Pada tahun 2023, Indonesia

mencatat skor 34 dari 100, menempati peringkat ke-115 dari 180 negara yang dievaluasi (Transparency International, 2023). Posisi ini menunjukkan ketertinggalan yang signifikan dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, dan Timor-Leste. Fenomena ini tidak hanya menciptakan citra yang merugikan di kancah internasional, tetapi juga secara langsung mengikis kepercayaan masyarakat global terhadap tata kelola pemerintahan Indonesia.

2. PERNYATAAN OPINI / TESIS

Korupsi tetap menjadi hambatan utama dalam upaya Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara yang lebih maju. Selama korupsi masih merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan dan di sektor publik, pertumbuhan ekonomi akan terus terhambat, daya tarik investasi asing akan menurun, dan kualitas hidup masyarakat tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun Indonesia memiliki potensi yang melimpah, yang masih kurang adalah integritas dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dijadikan prioritas utama bukan sekadar retorika, tetapi melalui tindakan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.

Pernyataan ini didasarkan pada bukti empiris, bukan sekadar kritik spekulatif. Berbagai negara yang sebelumnya dikenal memiliki tingkat korupsi yang tinggi telah berhasil mencapai status negara maju setelah menerapkan reformasi radikal dan konsisten terhadap sistem tata kelola mereka, seperti Korea Selatan dan Taiwan (Quah, 2010). Fakta ini menegaskan bahwa kemajuan nasional dapat terwujud, asalkan didukung oleh kemauan politik yang kuat dan komitmen kolektif untuk memberantas korupsi secara menyeluruh.

3. ARGUMEN ILMIAH

3.1. Korupsi Menguras Anggaran Pembangunan Negara

Setiap dana yang dikorupsi pada dasarnya merupakan perampasan hak masyarakat luas. Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), negara mengalami kerugian tahunan sebesar triliunan rupiah akibat praktik korupsi di Indonesia (KPK, 2023). Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan, dan sarana umum lainnya justru disalahgunakan untuk keuntungan pribadi para pejabat korup. Akibatnya, proses pembangunan terhambat, kualitas infrastruktur menurun, dan masyarakat di daerah terpencil terus terabaikan.

Penelitian dari berbagai lembaga ekonomi menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih (Mauro, 1995). Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat bawah dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang diterbitkan oleh Transparency International (2023), yang mencerminkan bahwa masalah ini belum terselesaikan secara efektif.

Salah satu contoh yang jelas adalah penyalahgunaan dana di sektor infrastruktur. Proyek-proyek pembangunan jalan, jembatan, dan gedung pemerintah yang menghabiskan porsi besar dari anggaran seringkali menghasilkan hasil yang tidak memenuhi standar akibat markup anggaran dan penggunaan bahan-bahan berkualitas rendah. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan pemborosan anggaran, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna fasilitas-fasilitas tersebut. Ironisnya, beberapa tahun kemudian, proyek-proyek serupa harus dibangun kembali dengan alokasi dana baru, sehingga mengikis sumber daya publik tanpa menghasilkan nilai yang optimal.

Menurut data KPK, sektor pengadaan barang dan jasa publik adalah salah satu bidang yang paling rentan terhadap korupsi di Indonesia (KPK, 2023). Hampir setiap tahun, kasus korupsi dalam pengadaan tercatat, mulai dari insiden skala lokal di tingkat desa hingga kasus besar-besaran di tingkat kementerian. Situasi ini menggarisbawahi bahwa korupsi bukanlah fenomena eksklusif di jajaran atas pemerintahan, tetapi telah merasuki berbagai tingkat administrasi (Tanzi & Davoodi, 1997).

3.2. Korupsi Menurunkan Kepercayaan Investor dan Daya Saing Ekonomi

Para investor, baik domestik maupun asing, selalu mempertimbangkan iklim bisnis sebelum berinvestasi. Korupsi menimbulkan ketidakpastian hukum, mempersulit proses perizinan, dan meningkatkan biaya operasional perusahaan akibat pungutan liar di berbagai tingkatan birokrasi. Akibatnya, banyak investor memilih negara lain yang menawarkan transparansi dan bebas dari hambatan semacam itu.

Bank Dunia, dalam berbagai publikasinya, menekankan bahwa korupsi merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang (World Bank, 2022). Penurunan investasi menyebabkan terbatasnya peluang kerja, stagnasi pendapatan rumah tangga, dan kesulitan dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini

menciptakan lingkaran setan yang akan terus berlanjut selama korupsi tidak diberantas secara sistematis (Rose-Ackerman, 1999).

Sebagai perbandingan, Singapura yang di masa lalu juga bergulat dengan korupsi endemik telah berhasil memposisikan diri sebagai salah satu negara dengan tingkat integritas tertinggi di dunia melalui penerapan kebijakan antikorupsi yang tegas dan konsisten sejak era Lee Kuan Yew (Quah, 2010). Akibatnya, Singapura kini menjadi pusat bisnis dan keuangan terkemuka di Asia dengan arus masuk investasi asing yang masif. Indonesia dapat belajar dari contoh ini bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar kewajiban moral, melainkan strategi ekonomi yang terbukti efektif.

Dalam konteks Indonesia, banyak investor asing menyadari adanya peluang pasar yang besar, namun mereka enggan melakukan investasi berskala besar karena kekhawatiran terhadap birokrasi yang tidak transparan. Berbagai studi yang dilakukan oleh organisasi bisnis global secara konsisten mengidentifikasi korupsi sebagai hambatan utama dalam berbisnis di Indonesia. Setiap menit yang terbuang percuma akibat prosedur perizinan yang rumit dan setiap biaya terselubung yang harus ditanggung menjadi indikator negatif yang mengurangi daya tarik investasi.

3.3. Korupsi Merusak Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Negara-negara maju umumnya memiliki tenaga kerja yang kompeten, didukung oleh sistem pendidikan dan kesehatan yang memadai. Ironisnya, kedua sektor tersebut sering kali dilanda korupsi. Contohnya antara lain penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), markup harga yang tidak wajar dalam pengadaan peralatan medis, serta proses rekrutmen guru yang tidak transparan yang semuanya menyebabkan penurunan kualitas layanan publik.

Anak-anak yang berhak atas pendidikan berkualitas justru terpaksa belajar di lingkungan yang tidak memadai dengan sumber daya terbatas. Sementara itu, pasien yang berhak atas layanan kesehatan optimal harus menghadapi kekurangan obat-obatan dan tenaga medis. Masalah ini bukan sekadar akibat keterbatasan anggaran mengingat Indonesia telah mengalokasikan 20% dari anggaran nasional untuk pendidikan tetapi disebabkan oleh kebocoran fiskal akibat praktik korupsi (Badan Pusat Statistik, 2023).

Dampak dari situasi ini sangat nyata dalam kehidupan masyarakat. Ketika tunjangan guru di daerah terpencil tidak dibayarkan akibat penggelapan anggaran, kualitas pengajaran menurun. Demikian pula, kekurangan obat di puskesmas yang disebabkan oleh korupsi dalam pengadaan menghambat perawatan pasien yang optimal. Akibat jangka panjangnya adalah terciptanya generasi dengan pendidikan dan kesehatan yang di bawah standar, sehingga daya saing sumber daya manusia Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara lain.

3.4. Korupsi Menciptakan Ketidakadilan Sosial dan Memperparah Kesenjangan

Korupsi tidak berdampak sama terhadap setiap individu; dampaknya cenderung lebih berat dirasakan oleh kelompok-kelompok yang rentan dan tidak berdaya. Orang-orang kaya yang mampu menanggung biaya terselubung dapat memperoleh izin usaha dengan lebih mudah, sementara mereka yang memiliki koneksi dengan pejabat sering kali berhasil mendapatkan kontrak pemerintah meskipun tidak memenuhi kualifikasi standar. Sebaliknya, warga biasa yang tidak memiliki modal atau koneksi harus berjuang menghadapi birokrasi yang rumit dan tidak adil tanpa dukungan apa pun.

Koefisien Gini Indonesia yang terus-menerus tinggi mencerminkan ketimpangan distribusi kekayaan antara si kaya dan si miskin, sebuah masalah yang belum ditangani secara efektif (Badan Pusat Statistik, 2023). Penyebab utamanya adalah distribusi manfaat pembangunan yang tidak merata, yang sebagian besar didorong oleh praktik-praktik korupsi (Rose-Ackerman, 1999). Program-program bantuan sosial yang ditujukan bagi kaum miskin seringkali gagal menjangkau penerima yang dituju, sehingga menciptakan ketidakadilan struktural di mana mereka yang paling membutuhkan justru menjadi korban terbesar.

Selain itu, korupsi juga menimbulkan ketimpangan di dalam sistem peradilan. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering kali berakhir dengan hukuman yang tidak sebanding dengan kerugian yang diderita negara, atau bahkan kebebasan dari hukuman sama sekali. Sebaliknya, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh warga biasa yang sering kali didorong oleh kemiskinan justru dihukum secara berlebihan. Ketika keadilan tidak ditegakkan secara adil, kepercayaan masyarakat terhadap negara pun terkikis, yang berpotensi memicu ketidakstabilan sosial yang lebih luas.

3.5. Korupsi Melemahkan Tata Kelola Pemerintahan dan Demokrasi

Korupsi tidak hanya merusak keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Rose-Ackerman, 1999). Ketika pejabat yang seharusnya melayani masyarakat justru menyalahgunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi, legitimasi pemerintah pun menurun. Di Indonesia, skeptisisme masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sering kali dipicu oleh persepsi bahwa korupsi masih merajalela.

Dalam kerangka demokrasi, korupsi berpotensi mengancam integritas proses pemilu. Praktik politik uang yang merajalela dalam berbagai pemilu di Indonesia menghambat berfungsinya demokrasi secara optimal (Badan Pusat Statistik, 2023). Pemimpin terpilih lebih ditentukan oleh kemampuan mereka mendistribusikan insentif finansial kepada pemilih daripada rekam jejak atau kompetensi mereka, sehingga pejabat terpilih cenderung kurang akuntabel dalam melayani masyarakat dan mempertahankan siklus korupsi.

Yang lebih kritis lagi, keterlibatan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan dalam korupsi menimbulkan ancaman yang paling sistemik. Ketika lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan supremasi hukum terkompromi, masyarakat kehilangan perlindungan terakhirnya. Situasi ini secara efektif menyerahkan kedaulatan negara kepada segelintir aktor yang tidak bertanggung jawab, sementara masyarakat tidak memiliki mekanisme pengaduan yang kredibel.

4. DISKUSI / IMPLIKASI

Dampak korupsi tidak hanya terbatas pada masa kini; korupsi juga menimbulkan tantangan struktural bagi generasi mendatang. Penyalahgunaan anggaran saat ini akan mewariskan infrastruktur yang rusak, sistem pendidikan yang tidak memadai, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Beban ini tidak boleh menjadi bagian dari warisan mereka.

Dari perspektif kebijakan, implikasi utama argumen ini jelas: pemerintah harus memperkuat upaya pemberantasan korupsi, bukan melemahkannya. Langkah-langkah konkret meliputi penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), peningkatan transparansi anggaran, digitalisasi layanan publik, dan penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, peran

masyarakat sipil dan media sangat penting dalam mengawasi pemerintah guna meminimalkan peluang korupsi.

Dari perspektif ilmiah, penelitian tentang korupsi dan implikasinya terhadap pembangunan harus terus dikembangkan. Temuan empiris dari studi-studi tersebut harus menjadi dasar perumusan kebijakan, memastikan bahwa solusi yang dihasilkan bukan sekadar populis, melainkan didasarkan pada data dan terbukti efektif dalam praktiknya.

Salah satu temuan utama yang muncul dari analisis ini adalah perlunya reformasi birokrasi yang komprehensif. Digitalisasi layanan publik, sebagaimana telah terbukti di berbagai negara, secara efektif mengurangi peluang terjadinya korupsi dengan meminimalkan interaksi langsung antara pejabat pemerintah dan masyarakat yang merupakan sumber utama pemerasan. Inisiatif seperti sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan usaha di Indonesia merupakan langkah maju yang positif, namun perlu diperluas dan diterapkan secara merata di seluruh wilayah.

Dari perspektif budaya, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum dan struktural; transformasi budaya yang mendalam juga diperlukan. Masyarakat harus secara kolektif menolak dan mengutuk segala bentuk korupsi, sekecil apa pun. Praktik-praktik yang sudah mengakar seperti “uang pelicin” atau “beri suap dulu sebelum proses dilanjutkan” harus ditangani secara proaktif, mulai dari tingkat keluarga, melalui pendidikan, hingga ke komunitas terkecil.

Selain itu, pendidikan antikorupsi memainkan peran sentral. Menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sejak usia dini merupakan investasi jangka panjang. Meskipun dampaknya tidak langsung terasa, hal ini sangat penting bagi masa depan bangsa dalam 20–30 tahun ke depan. Kurikulum antikorupsi yang ada di lembaga pendidikan harus diperkuat bukan sekadar materi hafalan, tetapi diintegrasikan ke dalam praktik sehari-hari di sekolah.

Yang tak kalah pentingnya, penguatan perlindungan bagi pelapor kasus korupsi sangatlah penting. Di negara-negara maju, sistem perlindungan yang kokoh mendorong dilakukannya pelaporan internal. Di Indonesia, meskipun peraturan yang melindungi pelapor sudah ada, penerapannya masih perlu ditingkatkan. Banyak saksi kasus korupsi yang enggan

melapor karena takut akan konsekuensi yang akan mereka hadapi. Dengan perlindungan yang lebih kuat, kasus-kasus yang tersembunyi dapat terungkap.

5. PENUTUP

Korupsi bukanlah sekadar masalah individu, melainkan ancaman eksistensial bagi masa depan bangsa. Selama praktik korupsi terus merajalela di berbagai sektor tanpa tindakan tegas, aspirasi Indonesia untuk mencapai status negara maju akan tetap tertahan. Potensi besar bangsa ini tidak akan terwujud sepenuhnya jika pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terus mengeksploitasi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia kita.

Oleh karena itu, partisipasi kolektif dari semua pemangku kepentingan sangatlah penting. Pemerintah harus memperkuat mekanisme pengawasan dan menegakkan hukum secara adil dan tegas. Masyarakat harus proaktif dalam melaporkan tindakan korupsi yang disaksikan, sementara generasi muda perlu dibekali pemahaman mendalam tentang nilai integritas sejak dini. Hanya melalui sinergi di antara semua elemen bangsa, tingkat korupsi dapat ditekan, sehingga Indonesia dapat bergerak mantap menuju kemajuan yang substansial.

Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi konkret. Pertama, pemerintah harus menjamin kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui dukungan anggaran yang memadai dan perlindungan terhadap penyidik dari campur tangan politik. Kedua, transparansi dalam pengelolaan anggaran perlu ditingkatkan melalui platform digital yang dapat diakses publik, sehingga memungkinkan pengawasan langsung oleh masyarakat. Ketiga, reformasi rekrutmen pegawai negeri sipil harus berorientasi pada kompetensi dan integritas, bukan koneksi atau suap.

Keempat, sanksi terhadap pelaku korupsi harus dirancang untuk menciptakan efek jera yang optimal. Hukuman yang ringan tidak akan mampu mencegah pelanggaran, terutama jika para pelaku tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Penerapan sanksi progresif seperti penyitaan aset dan pencabutan hak politik harus menjadi prioritas kebijakan yang serius.

Kelima, pendidikan antikorupsi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum formal mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, bukan sekadar teori, tetapi melalui penerapan praktis dalam kegiatan sekolah sehari-hari.

Visi Indonesia Emas 2045 adalah aspirasi yang mulia; namun, realisasinya membutuhkan lebih dari sekadar retorika. Komitmen yang serius, integritas, dan keberanian kolektif diperlukan untuk membangun fondasi negara yang bebas korupsi. Setiap inisiatif kecil menuju integritas mulai dari menolak suap hingga melaporkan kecurangan merupakan kontribusi konkret bagi masa depan yang cemerlang. Pada akhirnya, Indonesia yang sejahtera adalah Indonesia yang bebas korupsi.

REFERENSI

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan Tahunan KPK 2023. Jakarta: KPK RI.
- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712.
- Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2023. Diakses dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- World Bank. (2022). Governance and Anti-Corruption. Diakses dari <https://www.worldbank.org/en/topic/governance>
- Tanzi, V., & Davoodi, H. (1997). Corruption, public investment, and growth. IMF Working Paper, 97/139. International Monetary Fund.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2023. Jakarta: BPS RI.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.
- Quah, J. S. T. (2010). *Curbing corruption in Asian countries: An impossible dream?* Emerald Group Publishing.